

TAJUK RENCANA

Menunggu Kiprah Promosi Pariwisata

SELAMAT datang lagi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, yang Senin (16/3) lalu dilantik Gubernur DIY. Badan promosi ini sangat punya peranan penting, untuk menjual pariwisata di tengah pandemi yang masih melilit. Lembaga yang kini diketuai GKR Bendara, diharapkan mampu berinovasi setelah setahun pariwisata DIY dalam kondisi matisuri. (KR 16/3).

Kehadiran BPPD DIY tersebut sangat relevan, mengingat sektor industri pariwisata dan pendukungnya memberikan kontribusi 64,6% dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di DIY. Karena itu peran BPPD DIY sangat penting, mengingat misinya untuk menggerakkan industri tersebut. Apalagi kalau kita hubungkan pernyataan Satgas Covid-19, bahwa penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 7 provinsi, khususnya mulai melandai. Di antaranya adalah DIY, yang angkanya mulai landai, meski bukan berarti aman.

Gelombang vaksinasi besar-besaran dilakukan dan masih berlangsung. Bahkan Presiden Jokowi mengharapakan bulan Juli mendatang sekolah sudah memulai tatap muka. Realitas itulah yang membuat seolah-olah pandemi seperti segera berakhir. Ini yang harus disikapi dengan persiapan yang matang.

Dalam catatan, pada libur Hari Raya Nyepi yang berkunjung ke DIY sedikitnya 31.164 wisatawan terdata melakukan kunjungan ke DIY. Menurut keterangan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo, jumlah kunjungan wisatawan itu tercatat melalui aplikasi Visiting Jogja dari 100 destinasi wisata yang beroperasi. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa Timur kemudian disusul wisatawan dari Jawa Tengah. Jumlah tersebut termasuk tertinggi selama kunjungan liburan tahun 2021.

KR menyebutkan di awal, selamat datang kembali, artinya BPPD DIY sebe-

narnya sebelumnya sudah ada. Namun gerakan untuk mendorong dengan gerakan kreativitas belum tampak signifikan. Kalau kemudian kunjungan wisatawan DIY naik, itu lantaran kreativitas masing-masing destinasi atau lembaga yang terkait. Karena itulah, gerakan yang tentu perlu sinergi dengan elemen yang terkait sangat diperlukan. Komitmen seluruh anggotanya diharapkan bisa memenuhi harapan mendongkrak kembali pariwisata Yogyakarta dalam *pranatan anyar* atau kebiasaan baru.

Kini pariwisata bukan hanya mengandalkan kuantitas saja. Di era pandemi sekarang ini, faktor kualitas dalam konsep pariwisata berkelanjutan mau tak mau harus dilakukan. Paratanan bahwa pariwisata harus Bersih, Sehat, Aman dan Menjaga lingkungan (CHSE) harus disiplin dilaksanakan.

Rencana untuk bekerjasama sama dengan seluruh unsur terkait, tentu layak didukung. Yang paling bisa dilakukan misalnya jika sebelum pertemuan pemerintah selalu dilakukan di kantor pemerintah, kini untuk menghidupkan hotel bisa dilaksanakan di hotel. Katering yang semula diborong pemerintah daerah, nantinya diberikan kepada industri katering swasta, misalnya. Demikian juga untuk semua yang berkaitan dengan jasa untuk kali ini bisa saja diserahkan ke swasta. Gerakan ini diharapkan bisa membantu sektor pendukung pariwisata agar bisa bangkit kembali.

Program semacam ini, tentu akan lebih kuat jika didukung dengan regulasi, bukan hanya pemerintah daerah namun pemerintah pusat. Peraturan ini akan membuat kebangkitan pariwisata dan sektor pendukungnya akan bangkit, menggerakkan ekonomi daerah bahkan nasional yang sangat tertekan di era pandemi. Tetapi semuanya akan berjalan baik, jika sekor pendukung juga punya komitmen tinggi. Selamat bekerja BPPD DIY. (****)

Senjakala Kemajemukan Parpol

Marwanto

berperan seperti itu. Umumnya tidak sabar berproses dan cenderung menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara instan. Dalam konteks ini, mengkooptasi parpol ke dalam kubu yang sedang berkuasa, lazim dilakukan.

Fakta sejarah membuktikan. Awal era Orde Baru terjadi fusi partai politik.



hadap parpol agar tidak punya *bargaining* di hadapan pemerintah.

Senjakala

Kasus Partai Demokrat adalah contoh mutakhir upaya kekuasaan menihilkan kemajemukan parpol. Sulit diterima akal sehat bahwa pemerintah tidak terlibat atas tragedi tersebut. Pertama, yang terpilih sebagai ketua umum kongres luar biasa (KLB) adalah Kepala Staf Presiden yang notabene orang lingkaran dalam pemerintah. Kedua, pemerintah membiarkan adanya KLB alasan kedua ini terbantahkan jika Kemendikbud tidak mengakui hasil KLB.

Ada yang menganggap SBY sedang menerima karma atas apa yang dilakukannya pada PKB-nya Gus Dur dulu. Dalam konteks tesis Meyer, apapun alasannya hal itu tak boleh terjadi. Keberagaman aspirasi politik dijamin di alam demokrasi. Namun kini senjakala kemajemukan parpol hampir terjadi. Karena (selain PKS), partai yang ada (lewat ketua umumnya) sudah "dipegang" dan satu barisan dengan pemerintah.

Pluralisme parpol kadang tak efektif untuk kelangsungan roda pemerintahan. Namun, jika harus ada penyederhanaan parpol, hal itu selayaknya dilakukan dengan cara elegan, di antaranya lewat jalan elektoral: misal meningkatkan ambang batas parlemen atau besaran daerah pemilihan. Pendek kata, rakyatlah yang menentukan lewat hajat-najarat pemilu. □

*)**Marwanto Msi**, anggota Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Utamakan Kreativitas Siswa

DILEMATIKA keadaan siswa selama daring menjadi kendala dalam mendapatkan hasil belajar maksimal. Berbagai gejala sosial muncul ketika siswa tidak berinteraksi dengan teman sejawatnya di sekolah. Gejala sosial yang muncul antara lain kurangnya kerja sama tim untuk penerapan belajar dengan metode diskusi, rendahnya komunikasi siswa dengan teman dan gurunya.

Mengurangi aktivitas di luar rumah selama masa pandemi memang begitu terasa lebih sulit. Tapi hal itu sangat bermanfaat agar dampak penularan virus mereda. Di masa ini, mereka harus berinisiatif sendiri untuk meningkatkan prestasi belajar selama daring.

Prestasi belajar bisa dicapai jika siswa memang berkeinginan untuk lebih maju. Perihal itu harus disertai kuatnya rasa ingin tahu terhadap materi, dan fokus akan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar kebanyakan diam saja. Akibatnya, hasil belajar siswa selama daring rendah. Hasil belajar rendah dikarenakan berbagai penyebab seperti tidak mau berpartisipasi belajar daring, tidak rutin mengikuti daring, meskipun demikian masih terdapat beberapa siswa yang aktif belajar daring.

Kategori siswa antusias belajar materi akan selalu mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Aktif bertanya kepada teman dan guru melalui whatsapp grup daring maupun pesan pribadi. Kreatif mencari materi tambahan melalui internet atau referensi buku lain yang masih terkait dengan materi belajar. Maka, hasil yang diperoleh akan berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut. Beda halnya jika siswa malas belajar hasilnya pun sangat kurang, sehingga nilai yang didapatkan di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Pengaruh terhadap proses pembelajaran

siswa perlu ditingkatkan dengan memprioritaskan nilai moral. Nilai moral dapat terbentuk melalui prinsip kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Mereka harus diarahkan untuk menanamkan prinsip nilai moral tersebut. Di sini, peran serta dari wali kelas, guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran sangat penting dalam mendukung siswa lebih optimal dalam belajar. Implementasi proses belajar tersebut, berdampak secara signifikan terhadap kondisi mental dan pola pikir siswa dalam jangka waktu yang panjang selama pandemi.

Berdasarkan pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Maka, peradaban manusia ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kreativitas. Harapannya kreativitas muncul dari tangan pendidik dan peserta didik demi kemajuan pendidikan nasional. Kemajuan tersebut dibuktikan dengan hasil belajar yang memuaskan baik dari segi nilai moral maupun ketuntasan nilai belajar.

Oleh karena itu, peran dari pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan proses belajar siswa. Motivasi untuk siswa senantiasa ditingkatkan dengan berbagai upaya melalui komunikasi efektif. Saat ini, penilaian tengah semester sedang dilaksanakan, jangan sampai siswa tidak mengikuti ujiannya. Risiko ada pada diri siswa sendiri. Ketika pihak sekolah sudah berupaya maksimal untuk kemajuan perkembangan belajar siswa, pertanyaannya siswa ingin maju atau tidak? Semua berada di tangan siswa. Jadilah siswa kreatif, meskipun berada di tengah masa pandemi.

Rika Yulastuti MPd
Guru Bahasa Indonesia SMKN 3 Yogya.

THOMAS Meyer dalam pemikirannya tentang 'sembilan tesis partai politik' menempatkan kemajemukan (pluralisme) sebagai tesis yang pertama. Pluralisme oleh Meyer ditempatkan pada nomor wahid mengingat fungsi dasar partai politik (parpol) sebagai sarana untuk mengagregasi berbagai kepentingan beragam. Juga mengarahkannya untuk kepentingan bersama, dan merancangannya dalam bentuk legislasi dan kebijakan.

Tujuan dari proses agregasi adalah untuk merumuskan kepentingan bersama, bukan berarti menihilkan kemajemukan. Bagi Meyer, dalam kehidupan yang demokratis, kemajemukan kepentingan bukan saja tak terhindarkan tetapi juga sah. Tentu selama semua pihak menghormati legitimasi lembaga demokrasi dan hukum yang ada. Dari sinilah, para elite politik dituntut kedewasaannya dalam berperan sebagai aktor pengambil kebijakan.

Cara Instan

Tidak mudah untuk berperan sebagai aktor politik ulung, melakukan negosiasi kepentingan pada berbagai pihak dengan tetap menjunjung tinggi fatsun politik. Sehingga tidak menimbulkan riak-riak atau kegaduhan yang kontraproduktif. Pihak yang diajak negosiasi tidak merasa kalah apalagi dipecundangi bahkan dicerderai dengan cara-cara yang melanggar aturan hukum.

Hal tersebut menuntut aktor politik dalam sebuah sistem demokrasi untuk tidak saja sabar menjalani proses. Namun juga harus punya visi kebangsaan untuk memajukan kepentingan umum. Sambil menjauhkan berpikir pragmatis jangka pendek yang hanya untuk melanggengkan pundi-pundi kekuasaan saja. Jika aktor politik mampu melakukan hal seperti itu ia tidak hanya seorang politikus *ansich*, ia telah merintis predikat sebagai bapak bangsa.

Menjalani proses sebagai aktor politik yang punya visi kebangsaan tentu tidak mudah. Akan sangat melelahkan. Tidak banyak politikus yang mampu dan mau

Memahami Kebijakan Vaksinasi

Sudjito Atmoredjo

WAKSINASI semarak berlangsung di seluruh penjuru negeri. Inilah salah satu upaya untuk merawat diri. Agar terbebas dari Covid-19. Hingga tulisan ini ditulis, ada sebagian warga telah divaksinasi. Ada pula yang belum, atau sedang menunggu undangan. Ada pula warga bersikap proaktif, mendatangi rumah sakit untuk segera divaksin. Biaya ditanggung sendiri.

Ada prioritas. Tidak ada diskriminasi. Itu bagian daripada kebijakan vaksinasi. Kiranya, perlu pengertian dan kesabaran semua pihak. Sesuai komitmen pemerintah, semua warga negara akan divaksin.

Tersebar kabar bahwa seseorang sudah divaksin, tetapi diundang lagi untuk vaksin ditempat berbeda, pada hari berbeda. Kenyataan demikian, merupakan bagian dari lemahnya administrasi. Boleh jadi, karena orang yang bersangkutan mendaftarkan diri secara online, atau didaftar langsung instansi tertentu. Tida gading tak retak. Sepatutnya kekurangan demikian disikapi dengan bijak.

Apresiasi terhadap petugas patut diberikan. Dalam segala keterbatasan, telah diupayakan pelayanan terbaik. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, bukanlah kuasa pada petugas ataupun pemerintah. Allah swt penentu akhir. DitanganNya segala persoalan kembali.

Dalam kesadaran demikian, ketika ada kematian pascavaksinasi, kiranya tak layak divonis sebagai kegagalan vaksinasi. Boleh jadi ada faktor lain lebih signifikan sebagai penyebabnya. Penelitian seksama terhadap kasus-kasus kegagalan (bila ada) perlu dilakukan, agar diperoleh kesimpulan yang objektif.

Pilihan terhadap bentuk pelayanan maupun jenis vaksin, merupakan bagian dari etika pelayanan kesehatan. Respek terhadap hak pribadi merupakan bagian

utama kewajiban moral. (Boumann, 2007: 5). Respek persona itu lahir dari nilai instrinsik atau nilai inherent pada setiap pribadi. Tidak tergantikan dengan respek lain. Tidak boleh direduksi (Kant, 2003). Oleh karenanya, perilaku masyarakat berbeda-beda, perlu direspons dengan *legawa*.

Apakah vaksinasi merupakan puncak perlawanan terhadap covid-19? Nanti dulu. Sekali lagi, vaksinasi hanyalah bagian dari upaya penghentian laju penularan covid-19. Pascavaksinasi masal, masih perlu evaluasi. Bila laju penularan menurun, laju kesembuhan meningkat, maka dapat dinyatakan vaksinasi berhasil. Grafik keberhasilan itu tidak muncul seketika, usai vaksinasi.

Artinya, semua warga yang telah divaksinasi tidak bijak, bila bersorak gem-bira, merdeka, lantas protokol kesehatan ditinggalkannya. Unggahan foto-foto di media sosial pun perlu dikendalikan. Vaksinasi, layak disyukuri dengan sikap *andhap asor*, lepas dari *pa-mer* dan percaya diri berlebihan.

Rencana reuni, pesta, pagelaran musik-budaya, wisata, dan acara lain sejenis, layak ditunda. Ungkapan *sabar iku subur, nekat iku hancur*", kiranya masih relevan. Belum saatnya, kumpul-kumpul.

Membebaskan diri dari Covid-19, merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga. Demi hidup, kehidupan, dan terpeliharanya kesehatan, maka menjaga integritas dan totalitas jiwa-raga, wajib dilakukan dalam kebersamaan dan kekompakan.

Kedaulatan Rakyat
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo S.Sos.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pojok KR
Pengurus BPPD DIY yang baru, dilantik.
-- Mudah-mudahan bukan sekadar hadir. Aksinya ditunggu.

Wacana Presiden 3 periode, menjerumuskan.
-- Waspada wacana yang merusak demokrasi.

Di Sleman, reunion SMP jadi ajang mabuk-mabukan.
-- Orang tua perlu waspada.
Beraba